

**STRATEGI PENGELOLAAN DANA GAMPONG DAN
IMPLIKASINYA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI GAMPONG SIMPANG TIGA KECAMATAN KLUET
TENGAH KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Isma Yanti

NIM. 140403107

Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M /1440 H**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah**



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Mahmuddin, M.Si
NIP. 197210201997031002

Fakhruddin, SE, MM.
NIP. 196406162014111002

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus dan Disahkan sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana S-1

Diajukan Oleh :

ISMAYANTI
NIM. 140403107

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 29 Januari 2019
23 Jumadil Awal 1440 H

di

Darussalam – Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi:

Ketua :

Dr. Mahmuddin, M. Si
NIP. 197210201997031002

Sekretaris :

Fakhruddin, SE, MM
NIP. 196406162014111002

Penguji I :

Drs. H. Maimun Ibrahim, MA
NIP. 195309061989031001

Penguji II :

Khairul Habibi, S.Sos.I.M.Ag
NIDN. 2025119101

Mengetahui,

4 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry


Dr. Falaq, S.Sos, MA
NIP. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Isma Yanti

Nim : 140403107

Jenjang : Strata Satu (1)

Prodi : Manajemen Dakwah (MD)

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

جامعة الرانيري Banda Aceh 08 Januari 2019

A R - R A N I R yang menyatakan




Ismayanti

Nim: 140403107

ABSTRAK

Alokasi Dana Gampong menjadi sebuah peluang bagi gampong dalam rangka melakukan pembangunan di gampong secara berkelanjutan dan berdaya guna bagi masyarakat. Permasalahannya adalah perangkat gampong secara umum sudah mensejahterakan masyarakat setempat, akan tetapi perangkat Gampong Simpang Tiga kurang mampu mengelola dana dengan baik karena dihadapkan dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengeloaan dan gampong terhadap kesejahteraan masyarakat, dan untuk mengetahui apa saja kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam mengelola dana gampong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Strategi Pengelolaan Dana Gampong Dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat sudah terlaksana dengan baik walaupun belum maksimal Ini terlihat dari diterapkannya *pertama*, perencanaan ADG (Anggaran Dana Gampong) *Kedua* penggunaan dan penganggaran ADG, dan pertanggung jawaban pemerintahan gampong atas pelaksanaan kegiatan ADG. Adapun faktor kekuatan kelemahan, peluang dan ancaman dalam mengelola dana gampong yaitu, *pertama* adanya dorongan dari kepala gampong bahwa dimana setiap manusia pasti memiliki skill atau kemampuan, *kedua* kelemahannya, ada sebagian perangkat gampong tugasnya *double*. *Kitiga* Peluang memanfaatkan dana yang diperoleh dari ADG dengan sebaik-baiknya *keempat* ancaman adanya sebagian masyarakat tidak mau memeberikan lahannya untuk perluasan pembangunan jalan pertanian.

Kata kunci : Strategi, Pengelolaan Dana Gampong, Kesejahteraan Masyarakat.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Strategi Pengelolaan Dana Gampong dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Gampong Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan”**. Shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam pelaksanaan dan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayah dan Ibu, serta keluarga besar yang telah banyak memberikan do'a, pengorbanan moral maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin Ak, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang memberi kesempatan, kemudahan, bantuan baik moral maupun materil kepada penulis dalam mengikuti pendidikan S1 di UIN Ar-Raniry yakni pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan seluru karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian untuk penulisan skripsi ini.
4. Ketua Prodi Bapak Dr. Jailani, M. Si. dan Bapak Drs. H. Maimun Ibrahim, MA. selaku Penasehat Akademik beserta seluruh Staf Prodi Manajemen Dakwah yang telah meluangkan waktu menuntun penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Mahmuddin, M.Si selaku pembimbing pertama, dan Bapak Fakhruddin, SE, MM. selaku pembimbing kedua yang telah berkenan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen yang telah mendidik, mengajar dan membekali ilmu kepada penulis selama menjalani pendidikan di program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
7. Bapak Gafaruddin selaku Camat Kluet Tengah dan Bapak Mahmuddin Keuchi Gampong Simpang Tiga yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini. selaku kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta Staf-stafnya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
8. Kepada sahabat-sahabat yang selalu memotivasi dan memberikan dorongan serta dukungan demi terselesaikan penulisan skripsi ini, dan kepada mahasiswa/i Manajemen Dakwah angkatan 2014.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan yang dapat menimbulkan kesalahan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirul kalam semoga bantuan dan jasa yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amin

Banda Aceh. 8 Januari 2019
Penulis,

Ismayanti

DAFTAR ISI

COVER

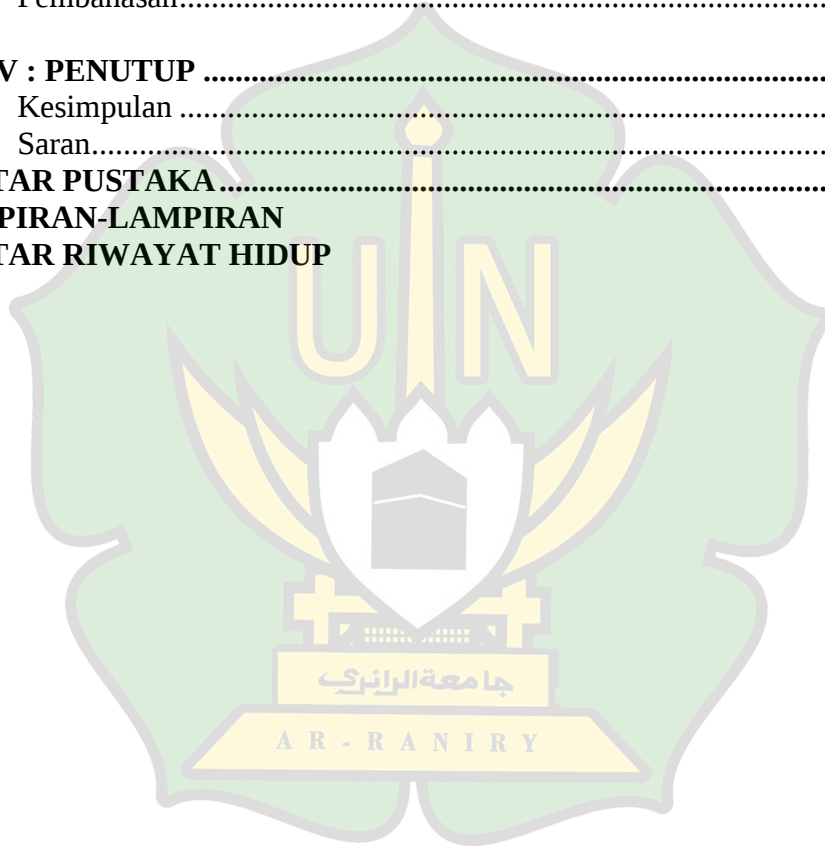
LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah.....	7
BAB II : LANDASAN TEORITIS	10
A. Strategi	10
1. Pengertian Strategi	10
2. Tipe-Tipe Strategi	11
3. Tahap-Tahap Strategi	12
4. Pelaksanaan	13
5. Faktor-Faktor Pendukung Pelaksanaan Strategi	14
B. Pengelolaan Keuangan Gampong	15
1. Konsep Pengelolaan Keuangan Gampong	16
2. Asas Pengelolaan Keuangan Gampong	22
C. Alokasi Dana Gampong	25
1. Pengertian Dana	25
2. Alokasi Dana Gampong	25
3. Tujuan Alokasi Dana Gampong	28
4. Fungsi dan Manfaat ADG	28
5. Manfaat Anggaran Pendapatan Belanja Gampong	30
D. Kesejahteraan Masyarakat	31
1. Definisi Kesejahteraan Masyarakat	31
2. Tujuan Kesejahteraan	37
3. Langkah-Langkah Mencapai Kesejahteraan	37
BAB III : METODE PENELITIAN	38
A. Metode Penelitian	38
B. Informan Penelitian	39

C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Hasil Penelitian	55
1. Strategi Pengelolaan Dana Gampong.....	55
2. Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman Dalam Pengelolaan Dana Gampong.....	69
C. Pembahasan.....	72
BAB V : PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Gampong Simpang Tiga.....	51
Tabel 4.3 Jumlah penduduk menurut mata pencaharian Gampong Simpang Tiga.....	53
Tabel 4.4 Jumlah penduduk tingkat pendidikan di gampong simpang tiga	54
Tabel 4.5 Pendidikan Terakhir Aparat Pemerintah Gampong Simpang Tiga	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

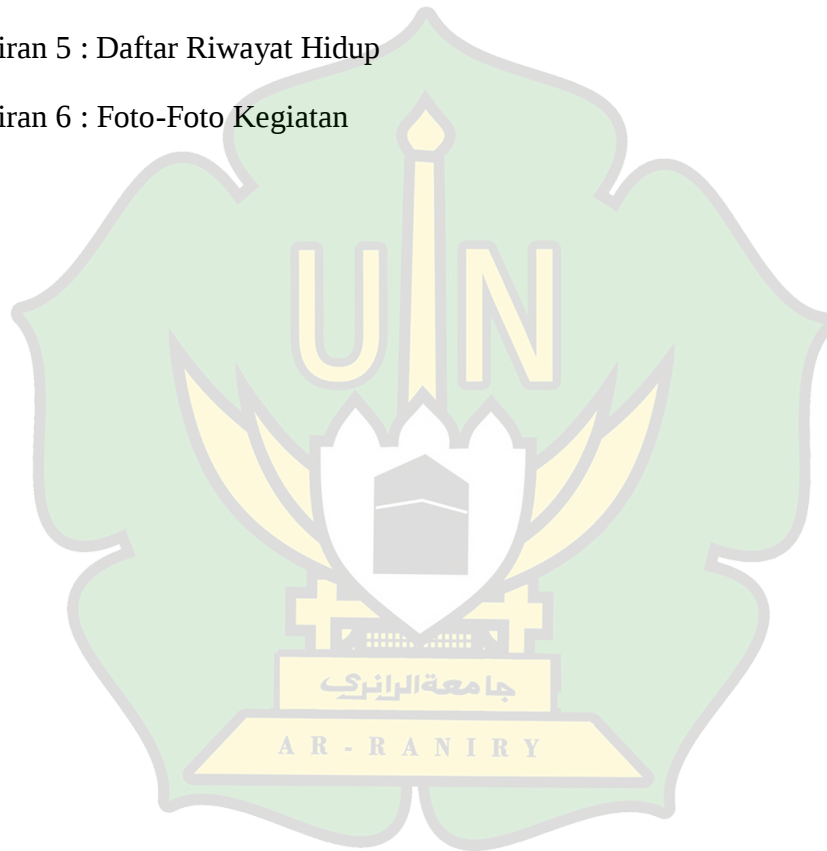
Lampiran 2 : Surat Penelitian Lapangan

Lampiran 3 : Surat Telah Penyelesaian Penelitian

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 6 : Foto-Foto Kegiatan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gampong Simpang Tiga yang terletak sekitar 12 km dari Kecamatan Kota Fajar sebagian besar petani dan pertukangan. Jumlah penduduk Gampong Simpang Tiga sebanyak 204 kepala keluarga (KK). Melihat persoalan sosial yang sering muncul adalah masalah yang berkaitan dengan pertanian dan persoalan infrastruktur gampong yang belum memadai.

Alokasi Dana Gampong (ADG) merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kaum perempuan. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹ Hal tersebut sesuai dengan Qanun Gampong Simpang Tiga Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun 2015 yang menyebutkan pengertian Anggaran Dana Gampong adalah dana perimbangan yang diterima gampong dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”²

Pembangunan gampong yang berkelanjutan akan menjadikan sebuah gampong berkembang dalam segala aspek terutama aspek infrastruktur yang merupakan sebuah kebutuhan masyarakat. Ketimpangan pembangunan yang terjadi di gampong dengan perkotaan membuat pembangunan gampong semakin mundur. Kemunduran pembangunan ini membuat kehidupan masyarakat

¹ Wayan Saputra, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*, 2009-2014 Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Volume: 6 Nomor: 1 Tahun:2016 hal 23

² Qanun Gampong Simpang Tiga, Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

gampong menjadi susah berkembang. Keberadaan gampong secara formal diakui dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah daerah nomor 27 tahun 2005 tentang gampong. Berdasarkan ketentuan ini gampong diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.³

Aceh memiliki keistimewaan dalam penyebutan gampong, sesuai dengan Qanun No 5 Tahun 2003 penyebutan nama desa khusus untuk Aceh disebut Gampong. Gampong memiliki pengertian yang sama dengan desa. Dana gampong adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi gampong yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan gampong yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.⁴ Dana gampong diharapkan dapat memberdayakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur gampong.

Pembangunan gampong agar menjadi setara dengan pembangunan kota diperlukan sebuah kerja keras dari berbagai unsur yang ada seperti pemerintah daerah, unsur gampong dan masyarakat itu sendiri. Tujuan dari pembangunan adalah untuk menjamin sebuah kelangsungan pembangunan sehingga menjadikan taraf hidup masyarakat gampong semakin lebih baik.

Perangkat gampong dapat memberdayakan gampong melalui sebuah kerja keras yang didukung oleh pemerintah melalui berbagai programnya. Pemerintah

³Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁴Qanun No 5 Tahun 2003 Penyebutan Nama Desa Khusus Untuk Aceh Disebut Gampong.

selama ini menjalankan sebuah program besar yang diharapkan menyentuh masyarakat gampong secara menyeluruh. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.⁵

Pada dasarnya dana gampong tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur semata, akan tetapi pemberdayaan masyarakat menjadi penting diperhatikan dan dilaksanakan supaya pembangunan dapat merata. Pemberdayaan yang dilakukan berupa penerapan modal usaha produktif meliputi usaha masyarakat setempat. Pembangunan yang melibatkan semua unsur gampong diharapkan tepat sasaran karena dikerjakan oleh masyarakat setempat. Pola seperti ini akan semakin mendekati pembangunan yang masyarakat harapkan. Dana yang sangat besar dikucurkan untuk setiap akan semakin membuat masyarakat akan hati-hati dalam penggunaanya karena membutuhkan pertanggungjawaban yang ketat. Dana gampong yang besar ini oleh masyarakat dikelola secara bersama untuk melakukan dalam berbagai aspek kebutuhan masyarakat secara luas.⁶

Pembangunan yang dilakukan melalui dana gampong pada dasarnya memiliki tujuan yang cukup baik. Akan tetapi tingkat efektifitas dari pembangunan masih belum teruji mamfaatnya karena infrastruktur yang dibangun masih ada yang belum dapat difungsikan secara tepat. Hal ini dapat merugikan

⁵Widjaja Haw. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. (P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2011) hal. 165

⁶ultazam F.M, dkk, *Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan* (Studi Gaya Kepemimpinan di Desa Maron Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo), Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember, Vol 1 No.1 2015 hal 45

masyarakat karena tidak dapat dirasakan oleh masyarakat dari hasil pembangunan tersebut. Efektifitasnya pembangunan tidak semata-mata diukur dari manfaat pembangunan akan tetapi juga diukur dari kualitas pembangunan baik dari segi fisik infrastruktur dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat serta pembangunan yang berdampak pada peningkatan pendapatan warga gampong baik langsung maupun tidak langsung.⁷

Dalam mengelola dana gampong yang perlu diperhatikan adalah masalah keuangan. Perangkat gampong harus sungguh-sungguh dan benar-benar memperhatikan masalah ini, terutama masalah pengelolaannya. Kalau pengelolaan keuangan gampong dapat dilaksanakan dengan baik, itu petanda perangkat gampong orang-orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Akan tetapi kalau pengelolaan keuangan gampong itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipercaya dan tidak bertanggung jawab. Misalnya saja keuangan gampong yang tidak jelas penggunaannya, sementara pertanggung jawab tidak ada.

Perangkat Gampong Simpang Tiga secara umum telah memikirkan tentang kepuasan serta kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Akan tetapi perangkat Gampong Simpang Tiga kurang mampu mengelola dengan baik dana yang terdapat di gampong tersebut. Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG) dan bendahara gampong diharapkan mengerti dan paham dalam pengelolaan Alokasi Dana Gampong. Dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Gampong pemerintah Gampong Simpang Tiga tersebut dihadapkan pada kondisi tingkat pendidikan masyarakatnya yang masih rendah.

⁷ Rahardjo Adisasmita. *Pembangunan Pendesaan*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hal 104

Berkaitan dengan Infrastruktur yang belum memadai membuat masyarakat belum merasakan kepuasan dari Anggaran Dana Gampong yang sudah ada seperti, pembangunan selokan, kantor desa yang kurang memadai dan tanggul yang belum dibuat menyebabkan banjir. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan mengambil judul skripsi yaitu :“ **Strategi Pengelolaan Dana Gampong dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan**”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Gampong Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.?
2. Apa saja kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam mengelola dana gampong di Gampong Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi pengelolaan Alokasi Dana gampong di Gampong Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan

2. Untuk mengetahui apa saja kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam mengelola dana gampong di Gampong Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat sebagai bahan masukan bagi ilmu sosial tentang segala hal yang timbul dari penelitian ini khususnya, dan dapat dijadikan referensi tambahan kepada mahasiswa lain dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.
2. Dapat Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan masukan bagi Pengelola Dana Gampong untuk dapat meningkatkan kesejahteraan gampong.
3. Diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan bagi aparaturnya gampong.

E. Penjelasan Istilah

1. Strategi berasal dari Bahasa Yunani “*strategos*” yang berarti jenderal atau panglima, sehingga strategi diartikan sebagai ilmu kejenderalan atau ilmu kepanglimaannya. Strategi dalam pengertian kemiliteran ini berarti cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk mencapai tujuan perang.⁸ Sedangkan secara terminologi banyak ahli telah mengemukakan definisi strategi dengan sudut pandang yang berbeda-

⁸ Gulo, W. *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta:Grasindo, 2008), hal 1

beda namun pada dasarnya kesemuanya itu mempunyai arti atau makna yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, diantara para ahli yang merumuskan tentang definisi strategi tersebut salah satu proses dimana untuk mencapai suatu tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi pada suatu persaingan guna mencapai sasaran. Strategi mengenai kondisi dan situasi dalam proses publik merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, tidak terkecuali dalam proses pelayanan yang baik kepada masyarakat.

2. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan ADG terintegrasi dengan APBG yang merupakan bagian pengelolaan keuangan gampong. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan gampong.⁹ Didalamnya disebutkan tahapan pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.

3. Dana Gampong, dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan.¹⁰ Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam rangka otonomi daerah yakni memberikan kepercayaan kepada gampong untuk mengurus kebutuhan gampong dalam rangka pemberdayaan

⁹ Undang-Undang No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan gampong

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta, Pusat Bahasa, 2008), Hlm 314.

masyarakat gampong untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat gampong tersebut.¹¹

4. Definisi Kesejahteraan Masyarakat

Masyarakat terbentuk melalui proses relasi yang kontinu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok. Interaksi yang terjadi secara berkesinambungan dalam waktu lama menghasilkan perasaan kebersamaan. Disamping itu, interaksi sosial juga menghasilkan beberapa pola hubungan bersama, nilai yang diakui bersama serta institusi sosial. Berbagai nilai dan institusi sosial tersebut dapat menjadi instrumen bagi terciptanya kehidupan yang lebih teratur dan lebih baik. Dengan demikian, kesejahteraan menjadi idaman setiap orang dan setiap masyarakat, bahkan Negara. Dalam perkembangan pemikiran pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan itu bukan hanya berupa modal fisik, sumber alam dan finansial melainkan juga modal sosial.¹²

¹¹ Amran dkk, *Alokasi Dana gampong Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai* 2016.

¹² Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2004) hal 1

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Kata “Strategi” berasal dari Bahasa Yunani “*strategos*” yang berarti jenderal atau panglima, sehingga strategi diartikan sebagai ilmu kejenderalan atau ilmu kepanglimaannya. Strategi dalam pengertian kemiliteran ini berarti cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk mencapai tujuan perang.¹³

Husein Umar mengutip pengertian strategi menurut Stephanie K. Marrus seperti yang dikutip oleh Sukristono, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai.¹⁴

Husein Umar juga mengutip pengertian strategi menurut Hamel dan Prahalad mendefinisikan strategi yang sifatnya lebih khusus yaitu : strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan, dengan

¹³ Gulo, W. *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hal 11.

¹⁴ Husein, Umar, *Strategic Management In Action*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). hal 31

demikian strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.¹⁵

Sedangkan secara terminologi banyak ahli telah mengemukakan definisi strategi dengan sudut pandang yang berbeda-beda namun pada dasarnya kesemuanya itu mempunyai arti atau makna yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, diantara para ahli yang merumuskan tentang definisi strategi tersebut salah satu proses dimana untuk mencapai suatu tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi pada suatu persaingan guna mencapai sasaran. Strategi mengenai kondisi dan situasi dalam proses publik merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, tidak terkecuali dalam proses pelayanan yang baik kepada masyarakat.

2. Tipe - Tipe Strategi david

a. Strategi Integrasi

1) Integrasi ke Depan (forward integration)

Integrasi ke depan (forward integration) adalah upaya memiliki atau meningkatkan kendali atas distributor atau pengecer. Saat ini semakin banyak perusahaan manufaktur (pemasok) yang menjalankan strategi integrasi kedepan dengan cara mendirikan situs web untuk menjual produk-produk mereka secara langsung kepada konsumen. Strategi tersebut menyebabkan gejolak di sejumlah industri.

¹⁵ Husein Umar, *Strategic Management In Action*,... hal 32

2) Integrasi Horizontal (Horizontal Integration)

Strategi pertumbuhan integrasi horizontal dilakukan melalui akuisisi perusahaan pesaing yang memiliki line of business yang sama. Yang dapat dilakukan dalam strategi ini adalah dengan meningkatkan ukuran perusahaan, meningkatkan penjualan, keuntungan dan pasar potensial dari perusahaan.¹⁶

3. Tahap-Tahap Strategi

Adapun tahap-tahap strategi yang dilakukan untuk pengelolaan dana gampong adalah:

a. Perencanaan ADG

Perencanaan ADG dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah gampong atau musrenbang gampong. Pada Gampong Simpang Tiga, musyawarah gampong dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja gampong (APBG), sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD).

b. Penganggaran

Penganggaran ADG dilakukan setelah hasil dari musyawarah gampong disetujui oleh seluruh pihak yang terkait di gampong, sehingga dapat disusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) selama satu tahun berjalan.

c. Mekanisme pencairan dan penyaluran ADG

Mekanisme ADG memiliki beberapa tahap yang harus dilaksanakan.

¹⁶ R. David, *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal 14

d. Penggunaan ADG

Dalam penggunaan dana untuk bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, baik itu berupa fisik maupun non fisik. Dimana biaya tersebut diperuntukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang hendak dilakukan kedepannya.

e. Pengawasan ADG

Pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan pelaksanaan pengelolaan keuangan. Pengawasan pengelolaan ADG secara fungsional yakni pengawasan oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah Kabupaten Aceh Selatan maupun Kecamatan Kluet Tengah yang menyelenggarakan pengawasan.

f. Pertanggungjawaban ADG

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah gampong.¹⁷

4. Pelaksanaan

- a. Setelah tahap perumusan strategi diselesaikan maka berikutnya yang merupakan tahap krusial dalam strategi perusahaan adalah tentang pelaksanaan strategi.

¹⁷ Chandra Kusuma Putra dkk, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6 Hal. 1203-1212 pada tanggal 15 november 2018, hal 23

- b. Pelaksanaan strategi adalah proses dimana strategi dan kebijaksanaan dijalankan melalui pembangunan struktur, pengembangan program, budget dan prosedur pelaksanaan.

Pelaksanaan strategi merupakan tahap yang paling sulit dalam proses strategi mengingat banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dilapangan dan mungkin tidak sesuai dengan perkiraan semula. Strategi yang berhasil harus didukung perusahaan yang *capable* dengan seorang pemimpin yang solid, alokasi sumber daya yang cukup, kebijaksanaan yang tepat, budaya, situasi dan kondisi terhadap keberhasilan pelaksanaan strategi.

5. Faktor-faktor yang Mendukung Pelaksanaan Strategi

a. Metode

Dari segi bahasa, metode berasal dari dua kata yaitu "mata" (melalui) dan "hadas" (jalan, cara). Dengan demikian kita dapat artikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu. Sumber lain menyebutkan bahwa metode berasal dari bahasa Jerman, *methodica* artinya ajaran tentang metode. Dalam bahasa Yunani, metode berasal dari kata *methodos* artinya jalan yang dalam bahasa Arab *thariq*.¹⁸ Metode berarti cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi.¹⁹

b. Taktik dan Teknik

¹⁸Suparta, dkk, *Metode Dakwah*, (Jakarta: Prenada media Group, 2009), hal. 36

¹⁹Sanjaya, Wina. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), hal 125

Teknik dan taktik berperusahaan merupakan penjabaran dari metode perusahaan. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode.²⁰ Misalnya cara yang bagaimana yang harus dilakukan agar metode perusahaan yang dilakukan berjalan efektif dan efisien.

Dengan demikian, sebelum pemimpin melakukan proses usaha sebaiknya memperhatikan kondisi dan situasi. Taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu.²¹ Dengan demikian, taktik sifatnya lebih individual. Dari penjelasan di atas, maka dapat ditentukan bahwa suatu strategi perusahaan yang diterapkan pemimpin akan tergantung pada pendekatan yang digunakan, sedangkan bagaimana menjalankan metode perusahaan seorang pemimpin dapat menentukan teknik yang dianggap relevan dengan metode.

B. Pengelolaan Keuangan Gampong

Pengelolaan menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengelolaan adalah penyelenggaraan pengurusan.²² Jadi pengertian pengelolaan adalah penyelenggaraan atau pengurusan yang terlibat dalam pelaksanaan dan “manajemen” berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.

²⁰Sanjaya, Wina. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*,...hal 126

²¹Sanjaya, Wina. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*,...hal 128

²² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *kamus besar bahasa indonesia*, cet.III, (Jakarta: Balai pustaka,2009), hal 49.

Jadi pengertian Pengelolaan berarti serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang.²³ Berdasarkan ketentuan ataupun acuan yang telah ditentukan pada saat penyusunan perencanaan awal didalam pelaksanaannya mendukung perencanaan pertama.

1. Konsep Pengelolaan Keuangan Gampong

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan juga diartikan penyelenggaraan pengurus atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dalam suatu tujuan organisasi.²⁴ Pengelolaan ADG terintegrasi dengan APBG yang merupakan bagian pengelolaan keuangan gampong. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan gampong.²⁵ Didalamnya disebutkan tahap-tahap pengelolaan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Menurut Sutarno perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dimana menyangkut tempat, dan siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara mencapai tujuan tersebut. Dari pernyataan tersebut perencanaan

²³ Willy Abdilla, M.s, *System Tatakelola Teknologi Informasi*, (Yogyakarta : Andi, 2010), hal 13

²⁴ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edii II (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 70

²⁵ Undang-Undang No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong

dapat diartikan sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemusatan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.²⁶

Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang. Pada hakekatnya perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan.²⁷ Dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya. Setiap perencanaan dibuat mengikuti tahapan tertentu. Tahapan tersebut biasanya berbeda- beda tergantung pada jenis perencanaan, tujuan perencanaan dan konteks perencanaan. Dalam tahap perencanaan meliputi identifikasi masalah, penentuan tujuan dan penyusunan dan pengembangan rencana kegiatan. Identifikasi masalah erat kaitannya dengan kebutuhan. Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai kekurangan yang mendorong masyarakat untuk mengatasinya. Penentuan tujuan dapat menjadi target yang menjadi dasar bagi pencapaian keberhasilan program. Selanjutnya penyusunan dan pengembangan rencana program, para perencana (*stakeholders*) bersama-sama menyusun pola rencana intervensi dan komprehensif. Pola ini menyangkut tujuan-tujuan khusus, strategi-strategi, tugas-tugas dan prosedur yang ditujukan

²⁶ Sutarno NS. *Manajemen Perpustakaan*, (Jakarta: Samitra Media Utama, 2004. hal 109

²⁷ Sutarno NS. *Manajemen Perpustakaan*,...hal 71

untuk membantu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan pemecahan masalah.²⁸

Penjelasan tentang konsep perencanaan, maka perencanaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu cakupan tindakan atau kegiatan pelaku (Pengelola ADG) dengan maksud tujuan tertentu yakni untuk memecahkan masalah yang ada dan memberikan solusi secara nyata berupa program-program untuk memecahkan masalah tersebut. Perencanaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana ADG di Kecamatan Kluet Tengah dalam pengelolaan Alokasi Dana Gampong. Dokumen perencanaan keuangan gampong meliputi RPJM Gampong dan RKP Gampong yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan gampong yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarahgampong dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan RPJM Gampong dan RKP Gampong dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan gampong yang melibatkan Badan Permasyarakatan Gampong dan unsur masyarakat Gampong. RPJM Gampong memuat penjabaran visi dan misi Kepala Gampong terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan gampong. RPJM Gampong ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak

²⁸ Sutarno NS. *Manajemen Perpustakaan*,...hal 75-78

pelantikan Kepala Gampong RKP Gampong merupakan penjabaran dari RPJM Gampong untuk jangka waktu satu tahun. RKP Gampong memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Gampong seperti pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat gampong. RKP Gampong mulai disusun oleh pemerintah gampong pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan gampong paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKPD Gampong menjadi dasar penetapan APB Gampong.²⁹

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan.³⁰

Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Penerapan

²⁹ Suharto, Edi *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (bandung : refika Aditama 2010) hal 96

³⁰ Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2008), hal. 71

kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan.³¹

Kepala Gampong adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat gampong. Perangkat gampong berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala gampong dan sekretaris gampong yang bertugas membantu kepala gampong dalam bidang administrasi pemerintahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala gampong sebagai satuan tugas kewilayahan. Pelaksana teknis merupakan unsure pembantu kepala gampong sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis Pengelolaan Keuangan Gampong adalah perangkat gampong yang ditunjuk oleh Kepala Gampong untuk melaksanakan pengelolaan keuangan gampong. Bendahara adalah perangkat gampong yang ditunjuk oleh Kepala Gampong untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, ,membayarkan, dan mempertanggung jawabkan keuangan gampong dalam rangka pelaksanaan APB Gampong. Pencairan dana dalam rekening Kas Gampong ditandatangani oleh Kepala Gampong dan Bendahara Gampong.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Menurut Arnos Kwaty dan Hansen mengatakan: pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang

³¹ Suharto, *Limbah Kimia Dalam Pencemaran Air dan Udara*, (Yogyakarta: 2010), hal.

dibutuhkan oleh para pimpinan untuk mengoperasikan pusat-pusat pertanggungjawaban mereka.³²

Dari konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur perencanaan dengan anggaran dan kegiatan dalam berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pengendalian periodik. Berdasarkan pernyataan diatas pertanggungjawaban dalam penelitian ini adalah laporan-laporan berkala yang dilakukan oleh Kepala Gampong sebagai Ketua Pelaksana ADG di. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Gampong dan diketahui Kepala Gampong ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.

Pertanggungjawaban APBG pada tahap ini bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBG meliputi :

1. Pelaporan ADG dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) yang mencakup: Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana, Masalah yang dihadapi dan pemecahannya, Pencapaian hasil penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG).
2. Pelaporan Keuangandilaksanakan oleh Kepala Gampong dan secara teknis dilaksanakan oleh Bendahara Gampong, pelaporan dilaksanakan setiap tahapan penerimaan ADG dilaporkan kepada

³²Arnos Kwaty dkk. *Akuntabilitas Manajemen*, (Jakarta : Erlanga 2005) hal 116

Bupati melalui Camat dan laporan keuangan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Kepala gampong menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBG kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan dan setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban penerimaan dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampirkan dengan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan bukti penerimaan lainnya yang sah. Laporan pertanggungjawaban pengeluaran dilampirkan dengan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan bukti atas penyetoran PPN atau PPh ke kas Negara.

2. Asas Pengelolaan Keuangan Gampong

Asas pengelolaan keuangan desa adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Gampong. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Gampong. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permerintah dalam negri No. 113 Tahun 2014, Keuangan Gampong dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.³³

a. Transparan

³³ Undang-Undang No. 113 Tahun 2014, tentang Keuangan gampong dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya. Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait Pengelolaan Keuangan Gampong. Transparansi dengan demikian, berarti Pemerintah Gampong pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengetahui informasi terkait Pengelolaan Keuangan Gampong.

b. Akuntabel

Pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban.³⁴ Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan sehingga pertanggungjawaban. Asas ini mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Partisipatif

³⁴ Lembaga Administrasi Negara, *Penyusunan Standar Publik*, (LAN: Jakarta 2003), hal

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan Keuangan gampong, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di gampong serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di gampong.

d. Tertib dan disiplin anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di gampong. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan gampong harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

C. Dana Alokasi Dana Gampong

1. Pengertian Dana

Dana adalah uang tunai atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Semakin besar dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan dapat memberikan kredit dan berarti semakin besar lembaga memperoleh pendapatan, sebaliknya semakin kecil dana yang dihimpun semakin kecil pula kredit yang diberikan, maka semakin kecil pula

pendapatan. Dana juga sering diartikan sebagai kas, sedangkan kas merupakan uang tunai yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau lembaga. Dalam hal ini, uang yang disediakan untuk biaya kebutuhan, keperluan dan operasi kebutuhan sehari-hari.³⁵

2. Alokasi Dana Gampong

Alokasi Dana Gampong (ADG) direvisi dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan beberapa proporsisi tambahan. Sumber Alokasi Dana Gampong tersebut berasal dari APBN yang disebut dana perimbangan yang dibagikan kepada daerah yang dinamakan dengan dana alokasi umum, dari dana alokasi umum tersebut kemudian kabupaten memberikan kepada gampong yang kemudian dinamakan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam rangka otonomi daerah yakni memberikan kepercayaan kepada gampong untuk gampong sesuai dengan kebutuhan gampong dalam rangka pemberdayaan masyarakat gampong untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat gampong tersebut.³⁶

Gampong memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas didalam pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan untuk penguatan otonomi gampong menuju kemandirian gampong. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang gampong, Posisi pemerintahan gampong semakin menjadi kuat, Kehadiran Undang-Undang tentang

³⁵ Padji Anoraga, *Menejemen Bisnis* (Jakarta : PT Rineka Cipta ; 2009) hal 244

³⁶ Amran dkk, *Alokasi Dana gampong Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai* 2016.

gampong tersebut disamping merupakan penguatan status gampong sebagai pemerintahan masyarakat.³⁷ Sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat gampong. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Gampong sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju gampong yang mandiri. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang gampong bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten yang dalam pembagiannya untuk tiap gampong dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Gampong (ADG). Alokasi Dana Gampong (ADG) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang gampong merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten, dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus Dalam pemberian Alokasi Dana Gampong (ADG) kepada gampong harus melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. menyusun program secara partisipatif melalui RPJM
- b. Menyusun rencana anggaran
- c. mengajukan program dan anggaran
- d. Penyaluran dana ke gampong

Penetapan besarnya Alokasi Dana Gampong (ADG) dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah gampong didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut:

³⁷ Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang gampong

- 1.) Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk gampong diwilayah kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah³⁸.
 - 2.) Dari retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah Kabupaten/Kota sebagian diperuntukan bagi gampong, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
 - 3.) Bantuan keuangan kepada gampong yang merupakan bagian dari dana pemerintah keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota antara 5% sampai 10%. Persentase yang dimaksud tersebut di atas tidak termasuk dana alokasi khusus.
3. Tujuan dari pemberian Alokasi Dana Gampong (ADG) adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan gampong dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
 - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di gampong dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi gampong.

³⁸Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat berekonomi lemah atau miskin.

4. Fungsi, Manfaat ADG

Fungsi utama Anggaran Dana Gampong Dengan adanya ADG pemerintah Gampong akan mengetahui secara jelas kegiatan pemerintahan dan pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan dengan perhitungan yang tepat. Tidak hanya berdasar perkiraan saja melainkan pelaksanaannya haruslah terarah pada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan skala prioritas. Secara terinci APBG mempunyai sejumlah fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi otorisasi
Anggaran Gampong menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan
- c. Anggaran gampong menjadi pedoman bagi aparat gampong dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.³⁹
- d. Fungsi pengawasan

³⁹Ismail Amir, dkk, Ismail Amir, dkk, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)*, (cetakan pertama:2009), hal. 5

Anggaran Gampong menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan gampong sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

e. Fungsi alokasi

Anggaran Gampong harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran, meningkatkan pelayanan, kesejahteraan dan mengurangi pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian gampong.

f. Fungsi distribusi

Kebijakan anggaran Gampong harus memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat Gampong.⁴⁰

g. Fungsi Stabilisasi

Anggaran pemerintah Gampong menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian gampong.

h. Fungsi ekologi

Anggaran Gampong adalah alat untuk menjaga kesinambungan atau keberlanjutan pembangunan, yakni dapat memenuhi Kebutuhan hari ini namun Memberikan kesempatan pada kebutuhan anak cucu.⁴¹

⁴⁰Ismail Amir dkk, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)*,,,,hal. 10

5. Manfaat Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Secara terinci manfaat penyusunan ABPG dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana untuk memberikan arah terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong dan sekaligus sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap segenap kegiatan pemerintah gampong.
- b. Memberi tanggungjawab kepada pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pembangunan dan pelayanan masyarakat gampong untuk menyelenggarakan administrasi keuangan Gampong sesuai dengan batas-batas kewenangannya.
- c. Memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber pendapatan gampong.
- d. Menjadi tolok ukur dalam menentukan jumlah dan besarnya pungutan yang dibebankan kepada masyarakat gampong.
- e. Masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.⁴²

D. Kesejahteraan Masyarakat

1. Definisi Kesejahteraan Masyarakat

Masyarakat terbentuk melalui proses relasi yang kontinu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok. Interaksi yang terjadi secara berkesinambungan dalam waktu lama menghasilkan

⁴²Ismail Amir dkk, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)*,...hal. 6

perasaan kebersamaan. disamping itu, interaksi sosial juga menghasilkan beberapa pola hubungan bersama, nilai yang diakui bersama serta institusi sosial. Berbagai nilai dan institusi sosial tersebut dapat menjadi instrumen bagi terciptanya kehidupan yang lebih teratur dan lebih baik. Dengan demikian, kesejahteraan menjadi idaman setiap orang dan setiap masyarakat, bahkan Negara. Dalam perkembangan pemikiran pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan itu bukan hanya berupa modal fisik, sumber alam dan finansial, melainkan juga modal sosial.⁴³

Menurut Soetomo kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban, keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi. Kondisi tentram lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan psikologi dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kehidupan yang merasakan suasana nyaman, terlindungi, bebas dari rasa takut. Dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmaniah melainkan juga rohaniah.⁴⁴

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

⁴³ Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2004) hal 1

⁴⁴ Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*,... hal 47

Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin.⁴⁵

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktifitas masyarakat.⁴⁶ dan kesejahteraan masyarakat menunjukan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan

32 ⁴⁵ Fahrudin, Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal

⁴⁶ Todaro dkk, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, (Edisi Indonesia, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2003) hal 12

yang lebih baik yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai kemanusiaan dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa

Kesejahteraan sosial menurut UUD Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial⁴⁷ pasal (1) ayat 1 “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan kondisi warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kebutuhan material merupakan kebutuhan materi seperti: sandang, pangan, papan dan kebutuhan lain bersifat primer, sekunder, tersier. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada masyarakat yang belum memperoleh pelayanan sosial dari pemerintah Akibatnya, masih banyak masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Kesejahteraan menurut Soetomo mengandung tiga komponen yaitu:

- a. Keadilan sosial mengandung sejumlah indikator yaitu: pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan air, penduduk miskin

⁴⁷ Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial

- b. Keadilan ekonomi mengandung sejumlah indikator yaitu: pendapatan, kepemilikan rumah, tingkat pengeluaran.⁴⁸
- c. Keadilan demokrasi mengandung sejumlah indikator yaitu: rasa aman dan akses informasi.

Kesejahteraan merupakan suatu ukuran untuk mencapai masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. menurut beberapa ahli. Kesejahteraan hanya diukur dengan indikator moneter menunjukan aspek ketidak sempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena ada kelemahan indikator moneter seperti :

1) Bappenas

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proposisi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proposisi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proposisi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proposisi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.⁴⁹

2) Biro Pusat Statistik

⁴⁸ Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*,... hal 48

⁴⁹ Bappenas, *Program pembangunan nasional penanggulangan kemiskina*, 2002. Hal 22

Menurut BPS ada 14 kriteria untuk menentukan keluarga dan rumah tangga miskin seperti luas bangunan, jenis lantai, dinding, sumber

penerangan, sumber air minum, jenis bahan bakar untuk memasak, frekuensi mengkonsumsi daging, susu dan ayam, frekuensi membeli pakaian dalam setahun, frekuensi makan tiap hari, kemampuan untuk berobat, luas lahan usaha tani, pendidikan kepala keluarga, dan tabungan barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.00, seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal, motor, barang modal lainnya. Dari beberapa definisi tentang kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan diatas dapat meliputi :

- a) Tingkat pendapatan. Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan atau kebutuhan lain yang bersifat material
- b) Komposisi pengeluaran. Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga selama ini, berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah

tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut

- c) Pendidikan. Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain.
- d) Kesehatan. Dalam data kesehatan termasuk dalam konsumsi rumah tangga.

2. Tujuan Kesejahteraan menurut Fahrudin mempunyai tujuan yaitu:

- a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok.
- b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat dilingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.⁵⁰

3. Langkah-Langkah Mencapai Kesejahteraan

Untuk mencapai kesejahteraan tidaklah gampang, dibutuhkan program-program yang bagus dalam menjalankannya. Dan salah satunya adalah program ADG Program ini adalah program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan

⁵⁰ Fahrudin, Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*,...hal 10

secara terpadu dan berkelanjutan dan dititik beratkan pada pencapaian kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu sebuah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental yang bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁵¹ Dalam pengertian lain juga disebutkan bahwa pendekatan kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.⁵² Sedangkan metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analisis yaitu “suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik yang berlangsung saat ini atau saat lampau.”⁵³

Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.⁵⁴ Dan menurut Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa deskriptif analisis adalah sebagai suatu

⁵¹Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), hal. 4

⁵²M. Nasir. *Metode Penelitian*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2008), hal.. 54

⁵³Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet.IV (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 54.

⁵⁴Sugeng D. Triswanto, *Trik Menulis Skripsi Dan Menghadapi Presentasi Bebas Stres* (Jakarta : Suka Buku, 2010), hal.. 134

penelitian yang mengumpulkan data dari lapangan dan menganalisa serta menarik kesimpulan dari data tersebut.⁵⁵

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dalam rangka melihat sebuah program yang dijalankan gampong berjalan dengan efektif khususnya berkaitan dengan dana gampong yang dikucurkan di Gampong Simpang Tiga.

B. Informan Penelitian

Informan adalah objek penting dalam sebuah penelitian. Informan juga diartikan orang-orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar tempat penelitian. Sasaran penelitian adalah Camat Kluet Tengah, keuchik dan aparatur pemerintahan Gampong Simpang Tiga lainnya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah letak dimana peneliti akan melakukan penelitian untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini diadakan di Gampong Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, tetapi dikhususkan tentang strategi pengelolaan dana gampong di Gampong Simpang Tiga

⁵⁵Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Cet. 3, (Jakarta: PT Bumi Aksa, 2009), hal. 52.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁵⁶ Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis Penelitian di lapangan dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan yang telah ditentukan yaitu Gampong Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah Dalam pengumpulan data di lapangan penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui :

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung⁵⁷. Dalam observasi, penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk melihat bagaimana pembangunan atau sarana dan prasarana serta infrastruktur yang ada di Gampong Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dengan cara tatap muka antara pewawancara dan informan.⁵⁸ untuk memperoleh data yang lebih valid,

⁵⁶Prof. Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), hlm.224.

⁵⁷Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009),hal. 220

⁵⁸*Ibid*, hal. 112.

peneliti melakukan wawancara dengan Camat Kluet Tengah, keuchik dan aparat pemerintah gampong lainnya. Wawancara ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah tentang Strategi Pengelolaan Dana Gampong Simpang Tiga Kecamatan Kluet serta Apa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam mengelola dana gampong di Gampong Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlaku yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen.⁵⁹ Dokumentasi yang diteliti adalah dokumen yang berupa arsip langsung tentang Strategi Pengelolaan Dana Gampong dan implikasinya bagi kesejahteraan masyarakat di Gampong Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Dokumentasi dalam penelitian ini mengumpulkan sumber data dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), berbentuk foto, profil gampong, visi dan misi gampong, data keadaan demografi, RPJM gampong.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara menganalisis data yang diperoleh dari penelitian untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Proses analisis data dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang telah

⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hal. 23.

diperoleh dari penelitian lapangan yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dan sebagainya.

Menurut Miles dan Huberman ada tiga proses analisis data.

1. Reduksi data, merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
2. Penyajian data, adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan, upaya penarikan kesimpulan secara terus menerus selama berada di lapangan, dari permulaan pengumpulan data, mencatat keteraturan pola-pola dalam catatan teori, penjelasan-penjelasan dan alur sebab akibat.⁶⁰

Tahapan-tahapan menganalisis data dalam skripsi ini adalah mencatat data apa yang dapat di lapangan (observasi), mengumpulkan data-data hasil wawancara serta dokumen-dokumen dan mengumpulkan data pendukung. Setelah dikumpul kemudian dipilih untuk di analisis pada tahap selanjutnya, kemudian diambil satu kesimpulan yang kemudian di tulis dalam bentuk laporan penelitian.

⁶⁰Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2004), hal. 39

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Gampong

Asal usul Gampong Simpang Tiga diawali oleh Asal Usul Gampong Simpang Tiga diawali oleh sekelompok orang perantau berasal dari sama dua ke manggamat dan bergabung dengan raja manggamat dimasa itu yang bernama *Tuk Linggung* serta meminta lahan berladang kepada beliau, lalu raja menunjukan lokasi berladang yang dimaksud, dengan izin raja selanjutnya pendatang bersama pendatang-pendatang yang lain menetap dan membuntuk sebuah perkampungan sebagai tempat untuk bermukim dan bercocok tanam serta mengembangkan ajaran-ajaran islam.⁶¹

Seiring dengan bertambahnya penduduk masyarakat perkampungan ini terus mengembangkan diri untuk melanjutkan kehidupan, pada umumnya penduduknya saat itu adalah petani dan peladang. Tanaman yang ditanam pada saat itu adalah padi, perkampungan yang didirikan ini pada akhirnya diberi nama Simpang Tiga.

Gampong Simpang Tiga ini mempunyai lahan pertanian dan perkebunan yang luas, gampong ini juga mempunyai kawasan galian pertambangan seperti bijih emas, bijih besi dan kandungan bumi lainnya serta hutan adat yang di mana dalam kesehariannya banyak ketergantungan hidup masyarakat dengan hutan.

⁶¹ Sumber : Data Dokumentasi di Kantor Keuchik Gampong Simpang Tiga

2. Sejarah Pembangunan Gampong Simpang Tiga

Pembangunan Gampong Simpang Tiga sejak dari tahun ketahun mengalami berbagai perubahan, mulai dari sistem perencanaan dan pembangunan yang dijalankan sampai pada pembangunan terjadi. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh seorang pemimpin gampong dan kondisi masyarakat dari masa itu sendiri. Secara umum pembangunan di gampong dilakukan dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari setiap pembangunan, baik dampak terhadap pembangunan itu sendiri maupun dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat secara sosial dan cultural pembangunan yang dilakukan merupakan proses yang dibangun dari dalam, artinya pembangunan yang melibatkan masyarakat baik secara gotong royong maupun swadaya, masyarakat masih memandang pembangunan gampong sebagai milik bersama yang dinikmati bersama, kebersamaan, gotong royong, keswadayaan merupakan nilai-nilai yang dikedepankan. Pembangunan tidak harus bergantung dari pihak lain, pembangunan bisa dilakukan sendiri. Nilai-nilai kesosialan menjadi modal awal pembangunan gampong seperti yang dilakukan oleh pendahulu. Dengan bekerja sama antara masyarakat, pemerintah gampong, serta berbagai elemen lembaga-lembaga donator/pihak ketiga masyarakat mampu melaksanakan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan.⁶²

⁶²Sumber : Data Dokumentasi di Kantor Keuchik Gampong Simpang Tiga

3. Visi dan Misi Gampong

Berdasarkan musyawarah gampong sosialisasi, validasi dan konfirmasi dan ditetapkan dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) Gampong Simpang Tiga telah dirumuskan visi misi Gampong Simpang Tiga, dan rencana pembangunan jangka menengah gampong (RPJMG) tahun 2014-2018 yaitu sebagai berikut :

a. Visi

Gampong Simpang Tiga di dalam menyusun perencanaan pembangunan mengara pada visi : “membangun Gampong Simpang Tiga dengan terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, makmur, damai dan bermartabat.”

b. Misi

- 1) Bidang pendidikan, Meningkatkan kapasitas dan mutu pendidikan anak wajib belajar 9 tahun
- 2) Bidang kesehatan, Peningkatan kualitas mutu kesehatan ibu dan anak dan kebersihan lingkungan.
- 3) Bidang insfrastruktur (sarana dan prasarana)Pembangunan, memperbaiki dan melestarikan insfrastuktur untuk menunjang peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan membuka akses perekonomian masyarakat.
- 4) Bidang sosial budaya, Membangun kelembagaan gampong dan memberdayakan kelembagaan gampong untuk kemandirian kelembagaan gampong dalam rangka peningkatan akses

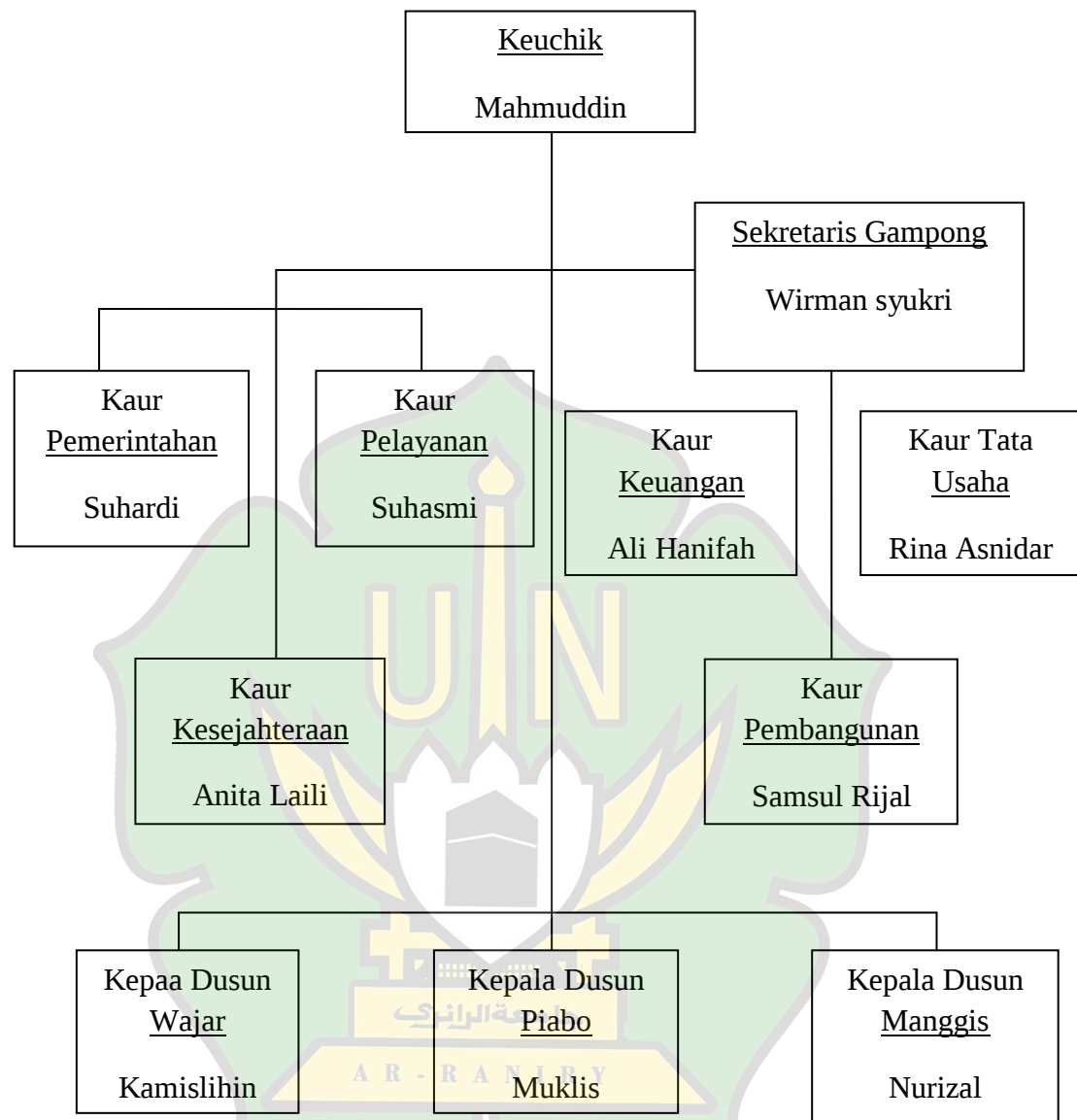
ekonomi, agama dan kegiatan sosial budaya lainya yang berdasarkan nilai-nilai keislaman.

- 5) Bidang ekonomi, Peningkatan insentif permodalan untuk pedagang kecil dan membuka akses permodalan melalui penguatan lembaga ekonomi.
- 6) Bidang pertanian dan perikanan, Peningkatan pembinaan dan bantuan perlengkapan alat pertanian dan bibit unggul untuk petani dan kelompok tani yang berkelanjutan mulai dari proses penanaman, pemeliharaan sampai dengan pemasaran hasil tani. Bidang pertanian dan perikanan adalah memberi bantuan kepada masyarakat tradisional.
- 7) Bidang lingkungan hidup, Penghijauan lingkungan gampong dengan menanam tanaman tumpang serta pemanfaatan potensi yang belum dimanfaatkan.⁶³

4. Struktur Organisasi Pemerintah Gampong Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Gampong Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan

⁶³Sumber : Data Dokumentasi di Kantor Keuchik Gampong Simpang Tiga.



Sumber : Data Dokumentasi di Kantor Keuchik Gampong Simpang Tiga.

Keterangan :

- a. Kepala gampong : Mahmudddin
- b. Sekretaris gampong : Wirman Syukri
- c. Kaur Pemerintahan : Suhardi
- d. Kaur Pelayanan : Suhasmi
- e. Kaur Keuangan : Ali Hanifah

- f. Kaur Tata usaha : Rina Asnidar
- g. Kaur Kesejahteraan : Anita Laili
- h. Kaur Pembangunan : Samsul Rijal
- i. Dusun wajar : Kamislihin
- j. Dusun piabo : Muklis
- k. Dusun manggis : Nurizal⁶⁴

Adapun tugasnya yaitu :

- 1) Kepala gampong bertugas untuk : Memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong sesuai kewenangan yang diberikan, Berkewajiban mengetahui permasalahan yang terjadi di gampong dan cara memecahkan masalah tersebut, Pelayanan umum, memberikan pertanggung jawaban kepada bupati sehubungan dengan tugas-tugas yang telah diberikan.
- 2) Bidang Pemerintahan bertugas untuk Mengadakan pembinaan administrasi gampong, Rapat koordinasi tentang pelaksanaan semua peraturan Kecamatan kluet tengah, Pemeliharaan ketentraman dan keterlibatan masyarakat gampong, Bersama sama dengan BP menyusun dan menetapkan APBG, Melakukan pendapatan dan pembinaan administrasi penduduk Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat, kegiatan menetapkan pengelola tanah kas gampong, tanah adat dan tanah asset gampong dan Penetapan batas gampong.

⁶⁴ Sumber : Data Dokumentasi di Kantor Keuchik Gampong Simpang Tiga

- 3) Bidang Pembangunan bertugas untuk Koordinasi membina dan mengawasi pelaksana proyek-proyek yang dialokasikan di Gampong Simpang Tiga, Menghadiri rapat Musbang dan Musrembag Kecamatan kluet tengah, Menghadiri rapat sosialisasi, Penguatan swadaya masyarakat tani Pengembangan lembaga adat, Mendukung terlaksananya penataan lahan klarifikasi kebun, Pengawasan perluasan areal perkebunan Gampong Simpang Tiga, Pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang ada di Gampong Simpang Tiga,
- 4) Bidang Kemasyarakatan bertugas: Penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit, Pengawasan terhadap dukun bayi, Pengawasan terhadap tenaga medis dipustu dan polingam, Pelaksanaan posyandu, Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan Sosial, Pengawasan terhadap pengedar dan pengguna NARKOBA dan Pengawasan terhadap media informasi yang beredar.⁶⁵

5. Keadaan Demografi

a. Jumlah penduduk

Keadaan penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di gampong. Berdasarkan data yang diperoleh dari pendapatan masyarakat Gampong simpang tiga memiliki 3 dusun dengan jumlah KK 204 dan jumlah penduduk 749. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini.

⁶⁵Sumber : Data Dokumentasi di Kantor Keuchik Gampong Simpang Tiga.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Dusun di Gampong Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018

No	Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa
			Lk	Pr	
1	Dusun manggis	100	150	137	287
2	Dusun piyabo	50	114	109	223
3	Dusun wajar	54	117	122	239
Total		204	381	386	749

Sumber : Data Dokumentasi di Kantor Keuchik Gampong Simpang Tiga.

b. Bidang Sosial Budaya

Kehidupan sosial budaya dalam tataran masyarakat gampong simpang tiga merupakan suatu tataran yang berpegang teguh pada kepercayaan agama islam. Hubungan kekerabatan dan ikatan kekeluargaan dalam lingkup Gampong Simpang Tiga sangat erat dimana masyarakat memiliki unsure gotong royong yang sangat erat. Hal ini dapat di mengerti karena kependudukan gampong merupakan “*face to face group*” dimana mereka saling mengenal betul seolah-olah mengenal dirinya.

Hubungan kekeluargaan di antara masyarakat Gampong Simpang Tiga sangat erat, hal ini disebabkan karena terjadinya perkawinan sesama warga gampong. Dan kemudian menjadi dampak eratnya kekeluargaan dan emosiaonal yang terjalin di antara masyarakat Gampog Simpang Tiga.

c. Sumber Mata Pencaharian

Wilayah Gampong Simpang Tiga adalah wilayah dataran dengan latar belakang masyarakatnya adalah bertani dan beberapa orang PNS. Bertani merupakan mata pencaharian pokok masyarakat pada umumnya

dimana tanaman coklat, kelapa sawit, jagung, cabe dan sawah merupakan andalan untuk gampong ini.⁶⁶

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian Gampong simpang tiga memiliki 389 orang petani, 9 orang pedagang, 11 orang pertukangan dan 4 orang PNS. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Di Gampong Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Petani	389	Petani
2	Pedagang/ wiraswasta	9	Pedagang
3	Peternak	-	-
4	Pertukangan	11	Tukang batu dan kayu
5	Supir	-	-
6	Pekerjaan bengkel	-	-
7	rumah tangga	-	-
9	PNS/TNI/POLRI	4	PNS
Total		413	413

Sumber : Data Dokumentasi di Kantor Keuchik Gampong Simpang Tiga.

d. Pendidikan

Gampong simpang tiga memiliki 50 orang buta huruf, 100 orang tidak tamat SD, 426 orang tamat SD, 153 orang tamat SMLTP, 18 orang tamat

⁶⁶Sumber : Data Dokumentasi di Kantor Keuchik Gampong Simpang Tiga.

SLTA, 1 orang D2, 1 orang D3 dan 1 orang S1 dengan jumlah penduduk 749.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 4.4 Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di gampong simpang tiga kecamatan kluet tengah kabupaten aceh selatan tahun 2018

No	Jenjang Sekolah	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
		Lk	Pr	
1	Penduduk Buta Huruf	18	32	50
2	Penduduk Tidak Tamat SD	50	50	100
3	Penduduk Tamat SD/Sederajat	201	222	426
4	Penduduk Tamat SMLTP/Sederajat	92	56	153
5	Penduduk Tamat SLTA/Sederajat	13	5	18
6	D-1	-	-	-
7	D-2	-	-	-
8	D-3	2	2	2
9	S-1	4	4	4
Total		381	368	749

Sumber : Data Dokumentasi di Kantor Keuchik Gampong Simpang Tiga.

e. Kesehatan

Secara umum kondisi kesehatan di Gampong Simpang Tiga sudah terbilang bagus, hal ini dikarenakan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan. Khusus di Gampong Simpang Tiga ada beberapa sarana dan prasarana, berdasarkan laporan data profil Gampong Simpang Tiga tahun 2018 yaitu:

- 1) Posyandu : 1 Unit
- 2) Bidan Desa : 2 Orang
- 3) Pustu : 1 Unit

B. Hasil penelitian

1. Strategi Pengelolaan Dana Gampong Di Gampong Simpang Tiga.

Alokasi Dana Gampong (ADG) merupakan salah satu aspek yang penting dari sebuah gampong sebagai pendorong untuk menjalankan program-program dari pemerintahan. Termasuk diantaranya adalah program untuk menyejahterakan masyarakat. Terkait dengan pengelolaan tersebut meliputi Perencanaan, penggunaan dan penggaraan Alokasi Dana Gampong (ADG), pertanggung jawaban Alokasi Dana Gampong (ADG). Menurut bapak Gafarrudin (Camat Kluet Tengah), Strategi pengelolaan Dana Gampong dalam Percepatan Pembangunan Gampong Simpang Tiga di Kecamatan Kluet Tengah merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan Anggaran Dana Gampong untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi. Hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di gampong agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.⁶⁷

Adapun tahap-tahap Strategi dalam pengelolaan dana di Gampong Simpang Tiga, antara lain adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan ADG

Gampong Simpang Tiga dalam hal perencanaan APBG tahun 2018 direncanakan di tahun 2017 atau di rencanakan pada tahun

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan bapak Gafaruddin (Camat Kluet Tengah), 24 setember 2018

sebelumnya. Proses perencanaan APBG tahun 2018 itu diambil dari perencanaan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan). Rencana APBG 2018 disusun dari tahun 2017.

“Proses perencanaan APBG untuk tahun 2018 itu sudah kami rencanakan dari tahun sebelumnya, begitu juga untuk tahun 2017 yang telah kami rencanakan dari tahun 2016, dan selanjutnya untuk tahun 2018 ini sudah kami rencanakan dari tahun 2017 yang lalu. Setelah rencana kami buat itu masih tetap ada perubahan yang dinamakan APDB”.⁶⁸

Tahap perencanaan Pengelolaan APBG di Gampong Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrenbang. Tim pelaksana APBG yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Gampong selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris gampong selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), bendahara gampong selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di gampong.

Hasil wawancara dengan Bapak Mahmuddin (geuchik GampongSimpang Tiga) menjelaskan mengenai bagaimana partisipasi masyarakatgampongdalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan(musrembang), yaitu sebagai berikut:

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan bapak Gafaruddin Camat Kluet Tengah , 24 setember 2018

“Dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) yang dilakukan, tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong rendah dalam melaksanakan musyawarah gampong, dapat dilihat dari tingkat kehadiran yang sedikit hanya sekitar 30% dari total masyarakat usia produktif, dan ditambah lagi aspirasi yang mereka sampaikan sangat minim pada saat musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) gampong sedang berjalan, Hal ini disebabkan masyarakat mempunyai kesibukan sendiri”.⁶⁹

Setelah diadakan musyawarah keputusan musyawarah tersebut akan ditindak lanjuti oleh Keuchik gampong dengan didampingi perangkat gampong dan masyarakat lainnya juga ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan-masukan lainnya tetapi tidak begitu banyak disebabkan oleh pekerjaan masyarakat tersebut adalah sebagai petani.⁷⁰

b. Penggunaan dan Penganggaran ADG

Seperti yang disampaikan oleh Pak Gafaruddin (Camat Kluet Tengah), bahwa :

ADG dilakukan setelah hasil dari musyawarah gampong disetujui oleh seluruh pihak yang terkait di gampong tersebut, sehingga dapat disusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) selama satu tahun berjalan.

71

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan bapak Mahmuddin (Geuchik Simpang Tiga), 21 september 2018

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan bapak Mahmuddin (Geuchik Simpang Tiga), 21 september 2018

⁷¹ Hasil Wawancara dengan bapak Gafaruddin (Camat Kluet Tengah) , 24 setember 2018

Rencana Penggunaan Dana (RPD) tersebut memuat penggunaan dana ADG Gampong Simpong Tiga pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 946,129,566.⁷² Dana tersebut cukup untuk dipergunakan tidak ada kelebihan dan tidak ada juga kekurangan dana. Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) tersebut dalam Qanun No 2 Tahun 2018. Dari keseluruhan dana yang ada telah disusun lima bidang program seperti dalam Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) di Gampong Simpong Tiga kelima bidang program pada Tahun 2018 yaitu :

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Bidang ini memerlukan dana Rp.225,144,240. Yang disediakan. Bidang ini lebih fokus pada belanja pegawai dan operasional gampong serta sistem administrasi gampong Tahun Anggaran 2018

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Dana dalam bidang pelaksanaan pembangunan gampong di tahun ini sebanyak Rp.397,657,000. Bidang ini merupakan bidang prioritas, dilihat dari lima bidang yang telah disusun, Alokasi Dana Gampong ini lebih banyak digunakan dibidang fisik karena untuk mensejahterakan masyarakat total anggaran digunakan untuk pembangunan. Yaitu empat pembangunan, antara lain: pembangunan jalan pertanian, pembangunan/pemeliharaan tempat ibadah, penambahan aset gampong. Pembangunan irigasi tersier dan pembangunan selokan, pembangunan ini sangat penting

⁷²Sumber :DataDokumentasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2018.

dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat seperti pembangunan jalan pertanian, untuk pembangunan jalan pertanian ini sangat mempermudah masyarakat untuk pergi melakukan pekerjaannya berkebun/petani. Karena dengan dibangun jalan pertanian masyarakat yang dahulunya hanya bisa berjalan kaki dikeranakan jalan yang rusak sekarang dengan dibangunnya jalan tersebut masyarakat sudah bisa menggunakan kendaraan dan juga bisa menghemat waktu bagi petani untuk melakukan pekerjaannya. Dengan diperluaskan jalan pertanian ini perekonomian masyarakat semakin meningkat dikarenakan masyarakat lebih mudah untuk membawa hasil perkebunan mereka sampai kerumah warga.

3) Bidang Pembinaan Masyarakat Gampong

Bidang ini menyerap total anggaran yang sejumlah Rp. 60,123,000. dengan 8 program yang dilakukan yaitu pembinaan keagamaan, kegiatan kelestarian, kegiatan olah raga, kegiatan penegakan syariat islam, kegiatan gotong royong gampong, pembinaan keamanan, kegiatan hari besar nasional dan kegiatan pembinaan kepemudaan.

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong

Anggaran dalam bidang ini sekitar Rp. 148,860,000. Bidang pemberdayaan masyarakat gampong ini dilakukan beberapa hal yang dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat seperti kegiatan keterampilan menjahit, menjahit merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perempuan yang memiliki minat untuk

belajar menjahit pelatihannya dilaksanakan 3 kali dalam seminggu, dengan adanya kegiatan keterampilan menjahit masyarakat yang dulunya masih belum terpenuhi ekonominya, namun setelah adanya usaha menjahit kini masyarakat bisa menambah penghasilan kebutuhan sehari-hari, meningkatkan kapasitas karang taruna/kepemudaan peningkatan kapasitas kader (PKK), pemberdayaan posyandu gampong, pelayanan pendidikan anak usia dini, penunjang taman pendidikan al-Quran, pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah, yang berbentuk susu dan kacang hijau dilakukan dalam satu bulan dua kali, pemberian santunan kepada anak yatim dan fakir miskin.

5) Bidang tidak terduga

Anggaran bidang ini sekitar Rp. 885,438,000 Bidang ini Merupakan kegiatan penanggulangan bencana dan lainnya.⁷³

Sedangkan dana Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) terdiri dari sektor pertanian dan jasa (keterampilan)

1. Sektor pertanian

Sektor pertanian seperti traktor untuk menggarap sawah mesin kilang padi dan pupuk yang digunakan untuk menyuburkan tanaman seperti padi, jangung dan sawit. Dengan adanya BUMG prangkat gampong bisa mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu, sedangkan untuk pembayaran jasa traktor dan pupuk

⁷³Sumber:DataDokumentasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2018.

diambil dari hasil pertanian masyarakat yang telah menerima bantuan

2. Jasa (keterampilan)

Jasa (keterampilan) dari BUMG berbentuk penyewaan pelaminan, perlengkapan untuk pernikahan seperti alat make up dan teratak.

Secara umum Pemerintah Gampong Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah telah menjelaskan dengan baik tentang tujuan penggunaan ADG yaitu digunakan pada pembiayaan bidang pemerintahan dan kegiatan pembangunan gampong dan non fisik. Hal tersebut diterangkan oleh Kepala gampong yaitu Bapak Mahmuddin (geuchik Gampong Simpang Tiga):

“ADG diperuntukkan sebagian dalam pembiayaan belanja operasional gampong dan untuk pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat”.⁷⁴

Penjelasan Pemerintah Gampong Simpang Tiga tentang pembangunan dengan menggunakan anggaran ADG. Salah satu yaitu bapak Samsul Rijal (kaur pembangunan):

“Pembangunan fisik itu digunakan 70% dari ADG. Tapi ADG juga digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan keterampilan menjahit, meningkatkan kapasitas karang taruna/kepemudaan peningkatan kapasitas kader (PKK), pemberdayaan posyandu gampong, pelayanan pendidikan anak usia dini, penunjang taman pendidikan al-Quran, pemberian makanan tambahan untuk anak

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Mahmuddin Geuchik Simpang Tiga, 21 september 2018

sekolah (SD), yang berbentuk susu dan kacang hijau dilakukan dalam satu bulan sekali, pemberian santunan kepada anak yatim dan fakir miskin

Pencatatan penggunaan ADG telah dilakukan dengan baik. Penggunaan ADG pada bidang operasional pemerintahan maupun pada bidang kegiatan pembinaan masyarakat telah dirincikan dengan baik. Sesuai dengan asas pengelolaan keuangan gampong yaitu tertib dan disiplin, anggaran yang mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di gampong. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan gampong harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut diterangkan oleh bapak wirman Syukri (sekertaris Gampong Simpang Tiga):

“Sebelum melakukan musrenbang gampong pertama harus mencari tahu berapa jumlah pagu anggaran ADG yang diterima. Perencanaan dilakukan bersama kelompok masyarakat melalui musyawarah gampong sebelum kembali dibahas di forum musrenbang kecamatan.”⁷⁵

Dengan melibatkan masyarakat secara umum dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) gampong, pemerintah Gampong Simpang Tiga memiliki pendapat yang sama bahwa ada beberapa penyebab yang tidak memungkinkan untuk melibatkan seluruh masyarakat.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Wirman Syukri (Sekretaris Gampong Tiga) 22 september 2018

“Kami tidak mengundang semua masyarakat karena tidak ada tempat yang muat. Kalau masalah transparansi kepada masyarakat tidak mungkin kita mau datang satu-satu untuk dikasih tau bahwa ada bantuan ADG. Kita hanya sampaikan informasi melalui Kepala Dusun, Setelah itu Kepala Dusun masing-masing akan menginformasikan hasil rapat kepada masyarakat setempat”⁷⁶

Bapak Muklis (Kepala Dusun Piabo) menyampaikan bahwa:

“Memang hanya kepala dusun di setiap dusun yang dipanggil dalam rapat rencana kerja dalam melakukan musrenbang gampong, setelah rapat nanti setiap kepala dusun yang mewakili rencana kerja itu disampaikan kepada masyarakat setempat”⁷⁷

Salah satu masyarakat Gampong Simpang Tiga, Bapak Amiruddin (warga) juga menyampaikan bahwa:

“Bagian Kepala Dusun memang selalu memberikan informasi kepada masyarakat-masyarakat di gampong ini. Kami Masyarakat Gampong Simpang Tiga sudah mempercayai para pemerintah gampong dalam melakukan segala hal yang mungkin menyangkut dengan bidang pemerintahan. Karena kami selaku masyarakat Gampong Simpang Tiga yang berprofesi sebagai petani yang dari pagi sampai sore berada dilahan pertanian kami, jadi kami tidak memiliki waktu untuk mengurus kinerja para pemerintah gampong. Jadi kami telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah gampong itu sendiri”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukan bahwa pemerintah Gampong Simpang Tiga telah menjabat sebagai perangkat gampong dalam waktu yang cukup lama sehingga dalam melaksanakan tugas tentu saja telah memiliki banyak pengalaman. Namun, dalam menjalankan tugas selama masa

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan bapak Mahmuddin (Geuchik Simpang Gampong Tiga), 21 September 2018

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan bapak Muklis (Kepala Dusun Piabo), 26 September 2018

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Amiruddin (Warga) 27 september 2018

pemerintahan yang ditekuni ternyata belum cukup untuk memberi pengalaman dikarenakan kebanyakan tugas mereka ditangani langsung oleh kepala gampong atau sekretaris gampong.

Berikut merupakan data hasil penelitian mengenai tingkat pendidikan prangkat Gampong Simpang Tiga, Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan aparatur pemerintah Gampong Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah yaitu pada tingkat sekolah menengah atas (SMA). Rendahnya tingkat pendidikan prangkat gampong menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada kinerja pelaksanaan pemerintahan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini.

Tabel 4.5 Pendidikan Terakhir Aparat Pemerintah Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan 2018

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Mahmuddin	Keuchik	SMA
2	Wirman Syukri Spd	Sekretaris	S1
3	Ali Hanafiah	Kaur keuangan	SMA
4	Suhardi	Kaur pemerintahan	STLA
5	Anita Laili	Kaur kesejahteraan	SI
6	Samsul Rijal	Kaur perencanaan pembangunan	SMA
7	Rina Asnidar	Kaur tata usaha	S1
8	Suhasmi	Kaur pelayanan	STLA
9	Nurizal	Kepala Dusun manggis	SMA
10	Muklis	Kepala Dusun piabo	Paket C
11	Kamislihin	Kepala Dusun wajar	Paket C

Sumber : Data Dokumentasi di Kantor Keuchik Gampong Simpang Tiga penjelasan

juga disampaikan salah satu prangkat Gampong Simpang Tiga, bapak Muklis (Kepala Dusun Piabo) bahwa:

“Kami di berikan SK pada bulan September, setelah penerimaan Sk kamipun langsung menjadi prangkat Gampong Simpang Tiga yang akan melaksanakan tugas”⁷⁹

Adanya keterbatasan pengalaman prangkat Gampong Simpang Tiga dalam menjalankan tugas, dapat menimbulkan permasalahan dalam bidang pemerintahan. Salah satunya mengakibatkan adanya prangkat gampong yang double jabatan dalam pengelolaan pemerintahan seperti yang dialami oleh sekretaris Gampong Simpang Tiga dalam pengelolaan ADG yang sekaligus diangkat jadi ketua pengelola ADG. Kejadian seperti ini terjadi bukan tanpa alasan melainkan adanya keterbarbatasan SDM ditingkat Gampong sehingga prangkat yang dianggap memiliki kemampuan cenderung diberi kewenangan lebih sementara pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan yang diatasnya belum maksimal.

c. Pertanggung jawaban ADG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang gampong dijelaskan bahwa proses penatausahaan dilakukan oleh bendahara gampong. Bendahara gampong wajib mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.⁸⁰ Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan bapak Muklis (Kepala Dusun Piabo Tiga), 26 september 2018

⁸⁰ Undang-Undang No 113 Tahun 2014 tentang gampong

bendahara gampong adalah melalui laporan pertanggungjawaban. Bapak Gafaruddin (camat kluet tengah) menjelaskan bahwa :

“Laporan pertanggungjawaban ini akan disampaikan setiap bulan kepada kepala gampong. Dokumen yang digunakan untuk penatausahaan transaksi penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Untuk proses pelaporan, kepala gampong akan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBG berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun kepada bupati”⁸¹

Laporan realisasi pelaksanaan APBG disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.⁸² Selanjutnya kepala gampong akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG kepada bupati setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG ditetapkan dengan peraturan gampong yang dilampiri format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG tahun anggaran berkenaan, format laporan kekayaan milik gampong per 31 Desember

⁸¹ Hasil Wawancara dengan bapak Gafaruddin (Camat Kluet Tengah) , 24 setember 2018

⁸² Chandra Kusuma, dkk, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6. Hal. 1203.1212, di akses pada tanggal 5 November 2018

tahun anggaran berkenan, format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke gampong.

Menurut bapak Wirman Syukri (Sekretaris gampong) menjelaskan bahwa:

“Untuk gampong Pemanggilan setiap laporan keuangan dikerjakan oleh aparatur gampong sesuai bidangnya masing-masing dan sudah kami lakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Laporan yang kami buat juga sudah kami serahkan secara lengkap kepada pihak kecamatan”.⁸³

Penjelasan sekretaris Gampong Simpang Tiga sudah sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban dan unsure akuntabilitas yang ada. Laporan pertanggungjawaban memang sudah harus dipiapkan oleh gampong.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan gampong juga menjabarkan lebih lanjut bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong.⁸⁴ yang disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan tersebut nantinya akan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan menggunakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media tersebut diantaranya papan pengumuman. Bentuk laporan akhir dari penggunaan alokasi dana gampong mencakup perkembangan pelaksanaan, Menurut bapak Wirman Syukri Sekretaris gampong)menjelaskan:

⁸³ Hasil Wawancara dengan bapak Wirman Syukri (Sekretaris Gampong simpang tiga) 22 september 2018

⁸⁴ Undang-Undang No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan gampong

“Gampong Simpang Tiga sudah memiliki Pertanggung jawaban yang merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban untuk tahunan. gampong juga sudah memiliki fasilitas sistem informasi yang memadai, Laporan pertanggungjawaban juga sudah diinformasikan kepada masyarakat dengan menempel salinan laporan tersebut di papan pengumuman.”⁸⁵

Penjelasan sekretaris gampong tersebut sudah sesuai dengan mekanisme pertanggung jawaban dan unsur akuntabilitas yang ada. Laporan pertanggungjawaban memang sudah harus disiapkan oleh gampong dan diinformasikan kepada masyarakat setempat agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses pengelolaan keuangan gampong.

2. Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman Dalam Mengelola Dana Gampong Simpang Tiga

Dalam melakukan suatu kegiatan tentu ada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh sebuah instansi atau lembaga, Menurut geuchik gampong simpang tiga (bapak Mahmuddin) :

“Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat gampong. Partisipasi masyarakat

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Wirman Syukri (Sekretaris Gampong simpang tiga) 22 september 2018

diperlukan untuk mewujudkan pembangunan gampong yang sesuai dengan kebutuhan gampong itu sendiri”.⁸⁶

Partisipasi masyarakat bukan hanya dilibatkan dalam pembuatan keputusan disetiap program pembangunan. Namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat.

Mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, dalam pegelolaan dana gampong dijelaskan sebagai berikut:

a. Kekuatan

- 1) Dorongan dari kepala gampong bahwa dimana setiap manusia pasti memiliki skill

b. Kelemahan

- 1) Ada sebagian prangkat gampong yang tugasnya *double* dibanding dengan prangkat yang lain.
- 2) Kriteria SDM yang dimiliki prangkat Gampong Simpang Tiga belum memenuhi syarat,

c. Peluang

- 1) Semangat kerja prangkat Gampong Simpang Tiga
- 2) Memanfaatkan dana yang diperoleh dari ADG dengan sebaik-baiknya.

d. Tantangan

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan bapak Mahmuddin (Geuchik Simpang Tiga), 21 september 2018

- 1) Perangkat gampong selalu lambat dalam penyeteroran LPJ karena ketidakmampuan perangkat gampong dalam menyelesaikan LPJ
- 2) Adanya sebagian masyarakat tidak mau memberikan lahannya untuk perluasan pembangunan jalan pertanian,

Terkait dengan kemampuan pemerintah gampong dalam pengelolaan alokasi dana gampong di Gampong Simpang Tiga yang memiliki faktor yang dapat mempengaruhi terhambatnya terlaksananya ADG di Gampong Simpang Tiga. Hal ini disampaikan oleh geuchik gampong simpang tiga (bapak Mahmuddin):

“Terhambatnya pelaksanaan alokasi dana gampong itu diakibatkan karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) Masalah kemampuan perangkat gampong, selaku pelaksana ADG itu sangat memiliki tanggungjawab yang besar terhadap tugas yang diberikan. Saya perhatikan semua perangkat gampong yang menjadi aktor dalam pengelolaan alokasi dana gampong itu semangat dalam bekerja.”⁸⁷

Dan Bapak geuchik gampong simpang tiga (bapak Mahmuddin) mengatakan lagi:

“Kalau tentang kekuatan perangkat gampong dalam pelaksanaan alokasi dana gampong di gampong ini, saya sudah melihat kinerja mereka beberapa tahun kemarin bahwa dimana mereka apabila diberikan tugas maka mereka akan menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik “⁸⁸

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan bapak Mahmuddin (Geuchik Simpang Tiga), 21 September 2018

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan bapak Mahmuddin (Geuchik Simpang Tiga), 21 september 2018

Gampong dikenal sebagai miniatur negara dimana pemerintahannya berhubungan langsung dengan rakyat. Oleh karena itu, prangkat pemerintah gampong tidak cukup jika hanya dibekali oleh pengalaman tanpa pengetahuan dan pendidikan yang baik.

C. Pembahasan

1. Strategi pengelolaan dana gampong

Strategi Pengelolaan dana gampong dilaksanakan pada gampong simpang tiga kecamatan kluet tengah terdiri dari berbagai strategi pengelolaan yang dilakukan oleh prakat gampong yaitu dengan perencanaan, penggunaan, pengguasaan dan penganggaran ADG dan pertanggung jawaban. Yang telah menjadikan pembangunan gampong kearah yang lebih maju. Sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan strategi pengelolaan pembangunan dana gampong.

Terkait dengan masalah strategi pengelolaan dana gampong, pihak prangkat gampong berkerja sama dengan lembaga lainnya, diantaranya dengan pemerintahan di kecamatan kluet tengah. Dimana kegiatan yang berjalan adalah pembangunan jalan pertanian, pembangunan/pemeliharaan tempat ibadah, penambahan aset gampong, pembangunan irigasi tersier dan pembangunan selokan yang dilakukan pada tahun 2018.

Perencanaan dana gampong dilakukan melalui musrembang gampong dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan masyarakat gampong. Musrembang gampong tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta

berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di gampong. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat. Tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, kondisi tersebut ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi/pendapat dalam musrembang yang telah dilaksanakan.

Permasalahan penggunaan penganggaran dana gampong, pihak prangkat Gampong Simpang Tiga berkerja sama dengan lembaga lainnya, diantaranya dengan pemerintahan di kecamatan kluet tengah. Dimana kegiatan yang berjalan adalah pembangunan jalan pertanian, pembangunan/pemeliharaan tempat ibadah, dan penambahan aset gampong. pembangunan irigasi tersier dan pembangunan selokan yang dilakukan pada tahun 2018. pengelolaan dana gampong pada gampong simpang masih kurang efektif karena sumber daya yang dimiliki oleh perangkat gampong masih terlihat rendah. Itu disebabkan pada tingkat pendidikan rata-rata prangkat Gampong Simpang Tiga tamatan sekolah menengah atas (SMA). Rendahnya tingkat pendidikan perangkat gampong menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada kinerja pelaksanaan pemerintahan.

Penanggung jawaban ADG adalah proses penatausahaan dilakukan oleh bendahara gampong. Bendahara gampong wajib mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan

secara tertib. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan bendahara gampong adalah melalui laporan pertanggungjawaban.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan gampong juga menjabarkan lebih lanjut bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong yang disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan tersebut nantinya akan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan menggunakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media tersebut diantaranya papan pengumuman. Bentuk laporan akhir dari penggunaan alokasi dana gampong mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana gampong, yang dilakukan musyawarah sebelumnya dengan masyarakat gampong. Penyampaian laporan tersebut dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu tim pelaksana tingkat gampong dan diketahui oleh kepala gampong ke tim pendamping tingkat kecamatan. Tim pendamping tingkat kecamatan tersebut membuat laporan dari seluruh laporan tingkat gampong di wilayahnya kepada bupati atau kepala badan pemberdayaan masyarakat.

Gampong Simpang Tiga dalam keterlibatan pembuatan laporan APBG yaitu sekretaris gampong dan bendahara. Proses laporannya adalah tim pelaksana kegiatan disertai anggaran yang direncanakan oleh sekretaris

gampong dan dibuat laporannya diketahui oleh kepala gampong Pelaporan penggunaan dana di Gampong Simpang Tiga meliputi :

- a. Laporan berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah relisasi penerimaan dana, dan realisasi belanja dana gampong .
- b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana gampong mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana gampong.
- c. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksana tingkat gampong dan diketahui kepala gampong kemudian ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat gampong di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati Tim Tingkat Kabupaten.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, menunjukan bahwa strategi pengelolaan dana gampong sedah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal seperti ketidaksesuaian nya perencanaan pendanaan dan lambatnya proes penyusunan. Peneliti melihat bahwa meskipun strategi pengeloaan dana gampong pada gampong simpang tiga belum maksimal, dengan adanya pengeloaan dana gampong diharapkan akan dapat

memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat gampong simpang tiga. Dengan harapan membentuk gampong yang lebih maju dan berkembang.

2. Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman Dalam Mengelola Dana Gampong

Dalam melakukan suatu kegiatan tentu ada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh sebuah instansi atau lembaga. Setelah peneliti melakukan penelitian di gampong simpang tiga maka dalam Strategi Pengelolaan dana gampong terdapat beberapa faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

a. Kekuatan

- 1) Dorongan dari kepala gampong bahwa dimana setiap manusia pasti memiliki skill

Prangkat gampong perlu melihat terlebih dahulu kekuatan yang dimiliki, sekalipun kekuatan ini tidak sepenuhnya merupakan keunggulan bersaing. Yang penting bagi prangkat gampong adalah memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menghadapi pesaing atau kompetitornya, salah satunya Adanya dorongan dari kepala gampong bahwa dimana setiap manusia pasti memiliki skill, karena skill itu dapat menunjang kita dalam melakukan sesuatu, dalam hal ini sebagai prangkat gampong memiliki skill untuk membangun gampong itu sendiri. Dari pemahan yang di berikan kepala gampong dan juga dari

pengalaman yang sudah didapatkan dari kegiatan-kegiatan selama ini yang sudah dilaksanakan,

b. Kelemahan

- 1) ada sebagian prangkat gampong yang tugasnya double dibanding dengan prangkat yang lain.

Prangkat gampong telah memiliki tugas masing-masing dari kepala gampong dikantor gampong itu sendiri, Sedangkan yang menyangkut tentang pelaksanaan ADG ada yang berperan aktif didalamnya seperti, sekretaris, kaur keuangan, kaur perencanaan dan anggota-anggota lainnya. Yang jadi pokok kelemahannya yaitu ada sebagian prangkat gampong yang tugasnya double dibanding dengan aparat yang lain, seperti sekretaris gampong. Sekretaris gampong memiliki tugas double, inilah yang merupakan kelemahan perangkat gampong dalam mengelola alokasi dana gampong sehingga dalam pengelolaan alokasi dana gampong tersebut jadi terhambat,

- 2) Kriteria SDM yang dimiliki prangkat Gampong Simpang Tiga belum memenuhi syarat.

Kriteria SDM yang dimiliki aparatur gampong pengelola belum memenuhi syarat, karena tingkat pendidikan yang masih rendah, ini mengakibatkan kurang efektifnya pengelolaan dana Gampong Simpang Tiga, seharusnya dengan potensi yang besar diperlukan SDM untuk mengoptimalkan pengelolaan dana gampong.

c. Peluang

1) Semangat kerja prangkat Gampong Simpang Tiga

Semangat kerja dan kondisi bahwa meraka sebagai prangkat Gampong Simpang Tiga memiliki tanggungjawab yang sangat besar itu merupakan peluang bagi gampong itu sendiri.

2) Memanfaatkan dana yang diperoleh dari ADG dengan sebaik-baiknya

Anggaran merupakan suatu hal yang penting karena anggaran dapat mendukung kegiatan pembangunan seperti pembangunan jalan pertanian, pembangunan/pemeliharaan tempat ibadah, pembangunan jembatan dan penambahan aset gampong.pembangunan irigasi tersier dan pembangunan selokan, hal ini menjadi peluang dikerenakan jika optimalnya pemanfaatan anggaran dana maka pembangunan gampong tersebut akan semakin maju.

d. Tantangan

1) perangkat gampong selalu lambat dalam penyeteran LPJ.

lambat dalam penyeteran LPJ karena ketidakmampuan prangkat gampong dalam menyelesaikan LPJ tersebut di sebababkan tidak dapat membagi pekerjaan dikantor Gampong Simpang Tiga hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia di kantor Gampong Simpang Tiga yang mengakibatkan terhambatnya pencairan ADG

2) adanya sebagian masyarakat tidak mau memberikan lahannya untuk perluasan pembangunan jalan pertanian.

Adanya sebagian masyarakat yang tidak mau memberikan lahannya untuk perluasan pembangunan jalan karena sebagian masyarakat merasa dirugikan disebabkan adanya tanaman yg sudah ditanam akan dirobohkan seperti batang kopi, pinang dan kemiri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan Di Gampong Simpang Tiga tentang strategi pengelolaan dana gampong peneliti dapat menyimpulkan :

1. Strategi pengelolaan dana Gampong Simpang Tiga memiliki beberapa tahap dalam strategi pengelolaan dana gampong yaitu : *pertama* perencanaan anggaran dana gampong (ADG) kemudian strategi *kedua* yaitu penggunaan dan penganggaran ADG, dari keseluruhan dana yang ada disusun lima bidang program pertama Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, kedua Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong, ketiga Bidang Pembinaan Masyarakat Gampong, keempat Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong, dan kelima Bidang tidak terduga. Kemudian strategi yang *ketiga* yaitu : pertanggung jawaban ADG, merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong yang disampaikan dan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan menggunakan media informasi papan pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pengelolaan dana gampong yaitu Kekuatannya dorongan dari kepala gampong bahwa dimana setiap manusia pasti memiliki skill, Kelemahannya ada sebagian prangkat

gampong yang tugasnya double, Kriteria SDM yang dimiliki prangkat Gampong Simpang Tiga belum memenuhi syarat. Peluangnya Semangat kerja prangkat Gampong Simpang Tiga, Memanfaatkan dana yang diperoleh dari ADG dan tantangan Tantangannya prangkat gampong selalu lambat dalam penyetoran LPJ, adanya sebagian masyarakat tidak mau memberikan lahannya.

B. Saran

Demi kemajuan dan keberhasilan Strategi Pengelolaan Dana Gampong Di Gampong Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintahan gampong hendaknya harus lebih tanggap dengan kondisi masyarakat dan mengatasi semua permasalahan yang Mengakibatkan lambannya pelaksanaan pembangunan agar pembangunan gampong tidak terus terhambat serta dalam proses pengelolaan dana gampong yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan musrembang, seharusnya melibatkan seluruh lapisan dan transparansi informasi, dan peningkatan progam pembangunan yang lebih baik lagi.
2. Masyarakat gampong harus ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan karena dengan keikutsertaan masyarakatlah maka pembangunan akan mudah terlaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran dkk, *Alokasi Dana gampong Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai* 2016.
- Arnos Kwaty dkk. *Akuntabilitas Manajemen*, Jakarta : Erlanga, 2005.
- Bappenas, *Program pembangunan nasional penanggulangan kemiskinan*, 2002.
- Chandra Kusuma, dkk, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6. Hal.1203.1212, di akses pada tanggal 5 November 2018.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *kamus besar bahasa indonesia*, cet.III, Jakarta : Balai Pustaka, 2009.
- David, *Manajemen Strategi*, Jakarta:Salemba Empat, 2009.
- Fahrudin, Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Gulo,W. *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta : Grasindo, 2008.
- Husein Umar, *Strategic Management In Action*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2008.
- Ismail Amir, dkk, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)*, cetakan pertama:2009.
- Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014, 2009-2014 Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Volume: 6 Nomor: 1 Tahun:2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008.
- Lembaga Asministrasi Negara ,*Penyusunan Strandar Publik* LAN 2003.
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2004.
- Nasir. *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2008.

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet.IV Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Padji Anoraga, *Menejemen Bisnis*, Jakarta : PT Rineka Cipta ; 2009.

Qanun Gampong Simpang Tiga, Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong

Qanun No 5 Tahun 2003 Penyebutan Nama Desa Khusus Untuk Aceh Disebut Gampong.

Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pendesaan.*,Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013.

Suharto, Edi Membangun, *Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, bandung : refika Aditama 2010.

Sutarno NS, *Manajemen Perpustakaan*,Jakarta : Samitra Media Utama, 2004.

Soetomo, *,Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal,*
Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2004.

Sugeng D.Triswanto, *Trik Menulis Skripsi Dan Menghadapi Presentasi Bebas Stres*Jakarta : Suka Buku, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2014.

Undang-Undang No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan gampong

Undang-Undang No. 113 Tahun 2014, tentang Keuangan gampong dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplinanggaran

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang gampong

Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

UU No. 34 Tahun 2000 tentang 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-Undang No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan gampong

Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan social

Undang–Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Ultazam F.M, dkk, Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan (Studi Gaya Kepemimpinan di Desa Maron Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo), Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember, Vol 1 No.1 2015

Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2011.

Willy Abdilla, *system tatakelola teknologi informasi*, Yogyakarta : Andi, 2010.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: B.5224/Un.08/FDK/Kp.00.4/11/2018

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2018, Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Mahmuddin, M. Si. (Sebagai Pembimbing Utama)
- 2). Fakhruddin, SE, MM. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
- Nama : Isma Yanti.
- NIM/Jurusan : 140403107/Manajemen Dakwah (MD).
- Judul : Strategi Pengelolaan Dana Gampong dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 7 November 2018 M.
29 Shafar 1440 H.

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,

Fakhrul

Terbuan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 07 November 2019.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah.ar-raniry.ac.id

Nomor : B.4621/Un.08/FDK.I/PP.00.9/09/2018
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Banda Aceh, 20 September 2018

Kepada

- Yth,
1. Camat Kec. Kluet Tengah Kab. Aceh Selatan
 2. Geuchik Gampong Simpang Tiga Manggamat Kec. Kluet Tengah Kab. Aceh Selatan
 3. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Selatan

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Isma Yanti / 140403107**
Semester/Jurusan : **IX / Manajemen Dakwah (MD)**
Alamat sekarang : **Rukoh Banda Aceh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *"Strategi Pengelolaan Dana Gampong dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan"*.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Wassalam

an Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN KLUET TENGAH
 Jln. Kotafajar-Menggamat No. ... Gampong Malaka Telp. Fax.
MENGGAMAT Kode Pos 23765

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423.1/ /2018

Camat Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan :

Nama : ISMA YANTI
 NIM : 140403107
 Semester/Jurusan : IX/ Manajemen Dakwah (MD)
 Alamat : Rukoh Banda Aceh

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan Pengumpulan Data Skripsi di Kantor Setcam Kluet Tengah dan Gampong Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

“Strategi Pengelolaan Dana Gampong dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Menggamat
 Pada tanggal : 20 Oktober 2018

A R - R



Tembusan :

1. Pembantu Wakil Dekan Bidang Akademik dan kelembagaan UIN Ar-Raniry
2. Ketua Jurusan/Prodi UIN Ar -Raniry
3. Mahasiswa Yang Bersangkutan



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN ACEH SELATAN**

Nomor : B-0296/BPS/11031/10/2018
Lampiran : -,-
Perihal : Diberi Izin Pengumpulan Data

Tapaktuan, 20 Oktober 2018

Kepada yang terhormat;
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Di -

Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Bapak tanggal 20 September 2018 Nomor : B.4621/Un.08/FDK.I/PP.00.9/09/2018, perihal Izin Penelitian Skripsi, bersama ini kami beritahukan pada Saudara bahwa Atas nama :

Nama : Isma Yanti
Nim : 140403107
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)
Alamat : Rukoh Banda Aceh

Benar telah melakukan pengumpulan Data di Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

A R - R A N I R Y

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN ACEH SELATAN

TUISMAD, S.Si

NIP.19640314 199003 1 003

Daftar Wawancara Aparatur Gampong

Jabatan :

1. Berapa lama bapak menjabat sebagai geuchik di gampong simpang tiga.?

Jawaban: _____

2. Selama bapak menjabat sebagai geuchik apa saja pembangunan yang sudah dibangun.?

Jawaban: _____

3. Apa saja bentuk pembangunan yang sudah dilaksanakan.?

Jawab: _____

4. Apakah kegiatan pemberdayaan pelatihan dalam bentuk keterampilan seperti, menjahit, membuat kue, modal usaha yang diberikan pernah dilakukan.?

Jawaban: _____

5. Bagaimana bentuk strategi pengelolaan dana gampong yang bapak lakukan.?

6. Apa saja hambatan bapak dalam menjalankan pengelolaan dana gampong.?

Jawaban: _____

7. Berapa jumlah anggaran yang diajukan dari mana.?

Jawaban: _____

8. Dari mana saja sumber dana untuk pembangunan gampong dan bagaimana cara pengelolaanya.?

Jawab: _____

9. Program apa saja yang ada digampong.?

Jawab : _____



Daftar Wawancara

Aparatur Kecamatan

Jabatan:

1. Berapa jumlah anggaran pembangunan gampong tahun 2017 dan untuk tahun 2018.?

Jawaban : _____

2. Dari sumber dana apa saja yang dialokasikan untuk pembangunan Gampong Timpang Tiga ?

Jawaban : _____

3. Bagaimana pelaksanaan berdasarkan evaluasi dan monitoring pada tingkat kecamatan tentang pelaksanaan penggunaan anggaran di Gampong Simpang Tiga.?

Jawab : _____

4. Bagaimana mekanisme penganggaran dana gampong.?

Jawab :

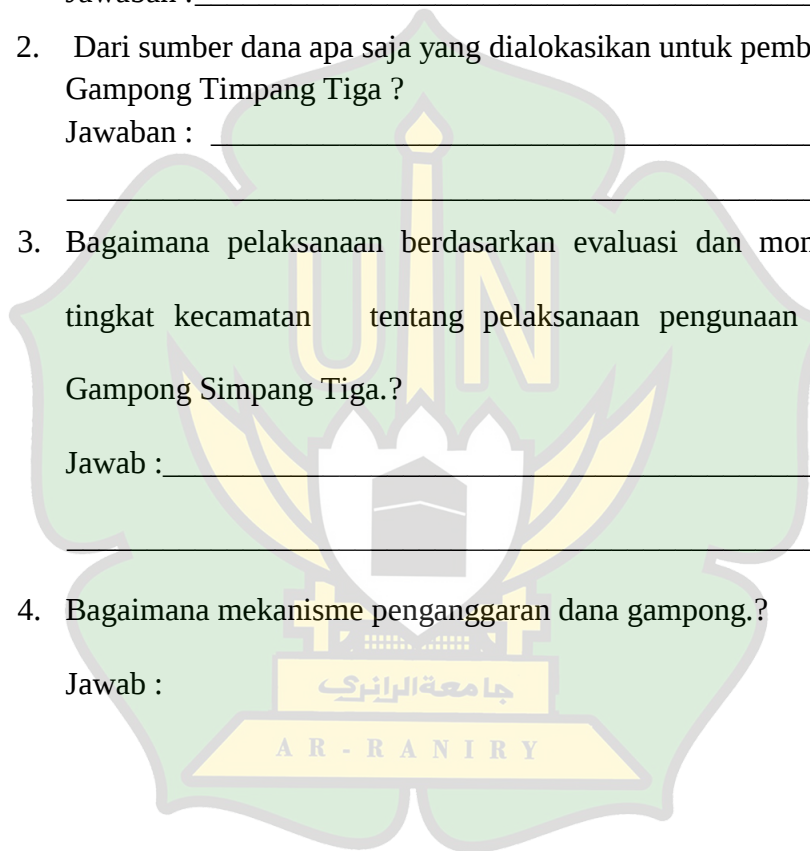


Foto Dokumentasi Penelitian Wawancara dengan keuchik gampong simpang tiga





Pengambilan Data Dokumentas Di BPS



Pengambilan Data Dokumentas Di BPS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas diri

1. Nama Lengkap : Isma Yanti
2. Tempat/ Tgl. Lahir : Simpang Tiga, 22 mei 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 140403107
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Gampong Simpang Tiga
 - a. Kecamatan : Kluet Tengah
 - b. Kabupaten : Aceh Selatan
 - c. Provinsi : Aceh
8. No. Telp/ Hp : 0852 7544 6625

Riwayat Pendidikan

9. SD : 2006
10. SMP : 2009
11. MAN : 2014
12. Uin-Ar-Raniry : Mauk Tahun 2014

Orang Tua

13. Nama Ayah : Iba krim
14. Nama Ibu : Asma Wati
15. Pekerjaan Orang Tua : Petani
16. Alamat Orang Tua : Dusun Wajar, gampong simpang tiga,

Banda Aceh 27 Desember 2019
Penulis,

Isma Yanti